

BAB I

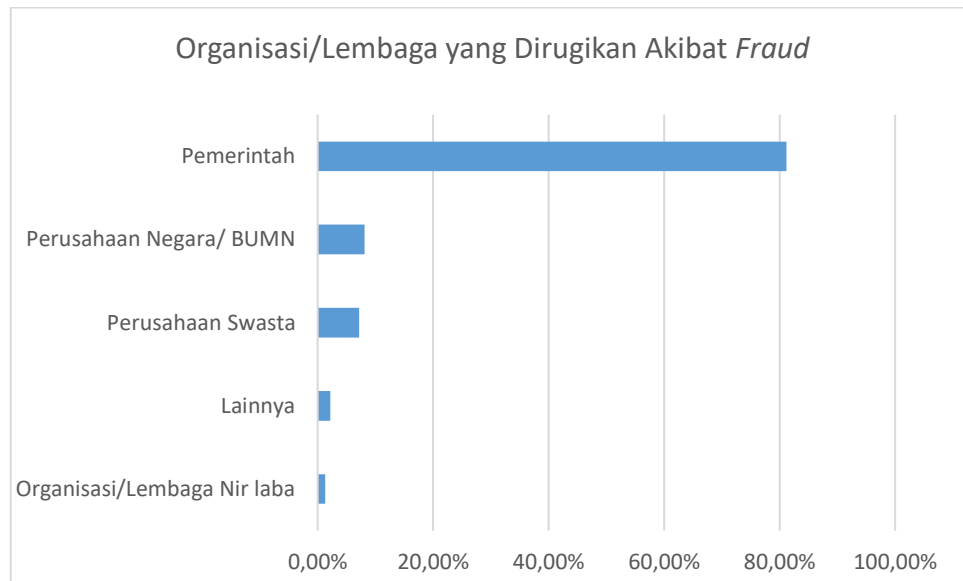
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, pertumbuhan perusahaan pun semakin meningkat. Karena itu pula pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan dengan bertambahnya perusahaan yang *go public* dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Keragaman jenis perusahaan yang tercatat di BEI dapat dikelompokkan menjadi beberapa sektor berdasarkan jenis usaha/industri yang dimiliki. Sektor – sektor tersebut adalah pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, *property, real estate* dan konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau milik swasta.

Definisi BUMN menurut peraturan perundang-undangan RI No. 45 Tahun 2005, Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan BUMN digolongkan menjadi 9 kategori, yaitu: farmasi, energi, logam, konstruksi, bank pertambangan, semen, angkutan, dan telekomunikasi. Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI berjumlah 20 perusahaan yang terdiri dari 16 perusahaan non-keuangan dan 4 perusahaan keuangan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI No. 45 Tahun 2005, dijelaskan bentuk-bentuk BUMN di Indonesia. BUMN dibedakan menjadi dua jenis yaitu Badan Usaha Perseroan (Persero) yang sahamnya minimal 51% dimiliki negara dan Badan Usaha Umum (Perum) yang memiliki modal seluruhnya dari negara.



Gambar 1. 1 Organisasi/Lembaga yang Dirugikan Akibat *Fraud*
Sumber: acfe-indonesia.or.id

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia, organisasi/ lembaga yang dirugikan akibat *fraud* yaitu pemerintah, perusahaan negara/ BUMN, perusahaan swasta, lainnya, dan organisasi/ lembaga nir laba. Salah satu jenis *fraud* yaitu kecurangan pada laporan keuangan memiliki nilai kerugian yang cukup besar menurut survei yang dilakukan ACFE Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia berdasarkan jabatan atau posisi, pelaku kecurangan peringkat pertama yaitu manajer, lalu direksi/ pemilik, karyawan, dan lainnya. Berbagai kasus yang menunjukkan lemahnya integritas laporan keuangan yang disajikan perusahaan melibatkan banyak pihak, mulai dari pihak internal sampai pihak eksternal (Mais & Nuari, 2017). Berdasarkan data yang telah disajikan BUMN menjadi peringkat kedua dan karena ini perusahaan milik negara pasti akan mempengaruhi peringkat pertama yaitu pemerintah atau negara sebagai pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, peneliti memilih penelitian ini terspesialisasi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Setiap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *go public* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia wajib menerbitkan laporan keuangannya secara periodik (Kusumawardani, Husaini, Administrasi, & Brawijaya, 2014). Keputusan

investor untuk menanamkan modalnya tak terlepas dari analisa kinerja perusahaan dan nilai perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan dituntut untuk disajikan dengan integritas yang tinggi (Lubis, Fujianti, & Amyulianthy, 2019). Jadi, informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus dibuat dengan benar, disajikan secara jujur, bebas dari rekayasa, tidak terdapat kesalahan material dan pengungkapan informasi yang sesuai dengan faktanya (Tussiana & Lastanti, 2016).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pada setiap perusahaan, laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawabnya kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah gambaran keadaan dari setiap perusahaan, oleh karena itu dalam proses penyusunannya harus dilakukan secara benar dan disajikan secara jujur kepada pengguna laporan keuangan. Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut (Setiawan, 2015).

Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan pengharapan para pengambil keputusan, dan informasi akuntansi dikatakan reliabel apabila dapat dipercaya serta membuat pemakai informasi bergantung pada informasi tersebut (Sukanto & Widaryanti, 2018). Perusahaan menyajikan informasi dalam laporan keuangan tidak mementingkan faktor integritas, oleh karena itu informasi yang disajikan tidak benar dan tidak adil bagi pengguna laporan keuangan. Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut, sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan (Tussiana & Lastanti, 2016).

Ukuran integritas laporan keuangan secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan

keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba. Beberapa peneliti menyatakan bahwa auditor lebih menyukai pelaporan yang konservatif (Setiawan, 2015). Karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme menjadi salah satu faktor untuk mengidentifikasi manipulasi laporan keuangan dan mengetahui apakah integritas laporan keuangan telah diterapkan dalam penyajiannya.

Seperti pada kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, melakukan salah saji dalam pencatatan piutang dalam bentuk laba untuk pembukuan tahun 2018. PT Garuda menteken kontrak dengan PT Mahata Aero Teknologi dan menurut catatan kontrak kerja sama itu membuahakan pendapatan dalam bentuk piutang senilai US\$ 239,9 juta atau sekitar Rp 3,47 triliun dengan hitungan kurs Rp 14.481 yang berlaku pada saat itu. Kerja sama ini ternyata berbuntut masalah. Musababnya, Garuda mencatatkan pendapatan piutang dalam bentuk laba perusahaan untuk pembukuan tahun 2018. Atas piutang itu, Garuda Indonesia mengklaim untung US\$ 5,01 juta dari kerja sama dengan Mahata.

Maskapai kemudian dinyatakan bersalah dan diganjar denda serta kewajiban menyajikan penyajian laporan keuangan pada 2018 kembali oleh Bursa Efek Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporan terbarunya, Garuda Indonesia ternyata mencatatkan rugi US\$ 175,02 triliun setelah piutang Mahata tidak dicantumkan dalam pendapatan. (ekonomi.bisnis.com)

Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kurang sehat cenderung melakukan kesalahan manajemen dan kecurangan yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangannya (Sukanto & Widaryanti, 2018). Ketidak jujuran perusahaan dalam penyajian laporan keuangan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan penggunaan informasi keuangan. Terbukti dari beberapa kasus manipulasi data akuntansi yang terjadi pada beberapa perusahaan menyajikan informasi dalam laporan keuangan dengan tidak memikirkan faktor integritas, yang mana informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan (Dwidinda, Khairunnisa, & Nur, 2017).

Istilah tata kelola perusahaan berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur, auditor dan pemegang saham. Istilah ini pun, merupakan kombinasi

hukum, peraturan, dan perilaku pribadi yang meningkatkan kinerja menjadi lebih efisien, menghasilkan keuntungan, serta secara umum memenuhi harapan masyarakat dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut mempunyai fungsi juga tanggung jawab yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan atau *corporate governance*.

Belum diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik dapat memicu perusahaan untuk memberikan informasi yang berdampak positif bagi kegiatan ekonomi perusahaan atau dengan kata lain melakukan manipulasi secara berkala untuk menghindari kredibilitas perusahaan yang buruk di depan publik. Perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik akan berjalan lurus dengan prestasi perusahaan dan akan mengurangi tindakan manipulasi. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dibutuhkan untuk menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah perusahaan (Agustina, Yuniarta, & Kadek, 2015). Pada penelitian ini, struktur *corporate governance* diukur menggunakan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan, dan tidak mewakili pemegang saham. Adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Sukanto & Widaryanti, 2018). Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang besar memiliki integritas laporan keuangan yang besar. Berdasarkan penelitian (Nicolin dan Sabeni, 2013), komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan arah positif dan menurut Setiawan (2015) komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2016) dan Hardiningsih (2010), tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham (Setiawan, 2015). Menurut

teori keagenan, adanya pemisahan kepentingan dan pengelolaan dalam perusahaan menimbulkan masalah keagenan karena adanya konflik kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dan manajer. Adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi masalah keagenan dengan manajer dan menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Sukanto & Widaryanti, 2018). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap integritas laporan keuangan (Setiawan, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Saksakotama (2012) dan Dewi dan Suryanawa (2014), kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian dari Nicolin dan Sabeni (2013), kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dan menurut Sukanti dan Widaryanti (2018) hasil penelitiannya tidak berpengaruh.

Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh keberadaan pemegang saham institusional terhadap kinerja manajemen, terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan (Setiawan, 2015). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba (Aljufri, 2014). Hal ini berarti semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka semakin tinggi nilai integritas laporan keuangan (Gayatri & Suputra, 2013). Menurut Aljufri (2014) kepemilikan institusional menunjukkan hubungan yang positif dan menurut Sukanto dan Widaryanti (2018) kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menjelaskan semakin besarnya kepemilikan institusional akan berpengaruh semakin besarnya integritas laporan keuangan. Sedangkan menurut Nicolin dan Sabeni (2013) kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dan menurut Gayatri dan Suputra (2013) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris

dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Komite audit memiliki tanggung jawab dalam hal mengawasi audit laporan keuangan, memastikan terpenuhinya standar dan kebijaksanaan keuangan, memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan standar dan kebijaksanaan, serta memastikan laporan keuangan yang dibuat telah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit (Saksakotama & Cahyonowati, 2014). Hal ini berarti bahwa semakin banyak anggota komite audit akan meningkatkan integritas laporan keuangan (Nicolin & Sabeni, 2013). Menurut Nicolin (2013) dan Gayatri dan Suputra (2013) komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan arah positif. Menurut Saksatoma (2014) komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dan menurut Wulandari dan Budhiarta (2014) komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Peneliti melakukan analisis pengaruh struktur *corporate governance* yang diukur dengan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap integritas laporan keuangan. Pemilihan variabel independen ini karena adanya inkonsistensi antara hasil penelitian sebelumnya dan ketersediaan jurnal pendukung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai hubungan masa struktur *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Informasi laporan keuangan adalah sumber pertama yang terpercaya tentang kinerja perusahaan. Pelaporan keuangan merupakan daya tarik utama yang bisa mempengaruhi keputusan manajemen maupun investor. Integritas laporan keuangan tergantung pada tata kelola perusahaan. Namun pada praktiknya

mewujudkan laporan keuangan yang berintegritas merupakan hal yang berat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan dengan integritas yang tinggi. Sehingga, dibutuhkan beberapa faktor untuk mengontrol kualitas pelaporan keuangan baik secara internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

Penelitian ini masih meneliti *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan karena terjadi beberapa ketidak konsistenan dari hasil penelitian yang menguji variabel serupa. Setelah dijelaskan mengenai latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan mencoba menguji apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi integritas laporan keuangan. Penelitian tentang integritas laporan keuangan ini dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018.

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana struktur *corporate governance* dan integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018?
2. Apakah struktur *corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a. Komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2014-2018?
 - b. Kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2014-2018?
 - c. Kepemilikan instutisional terhadap integritas laporan keuangan pada BUMN periode 2014-2018?
 - d. Komite audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah diuraikan penulis paparkan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui struktur *corporate governance* dan integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018
2. Untuk mengetahui struktur *corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018
3. Untuk mengetahui secara parsial:
 - a. Komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2014-2018
 - b. Kepemilikan manjerial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2014-2018
 - c. Kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2014-2018
 - d. Komite audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2014-2018

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian dan wawasan mengenai integritas laporan keuangan yang terkait faktor-faktor yaitu struktur *corporate governance*
2. Bagi para akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dalam pembahasan integritas laporan keuangan.

1.5.2 Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi penelitian mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan, diharapkan akan memiliki manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi pihak perusahaan, lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan seperti struktur *corporate governance*.
2. Bagi para investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk jadi pertimbangan dalam berinvestasi agar mencermati terlebih dahulu laporan keuangan yang terdapat dalam perusahaan *go public* yang berkaitan dengan penerapan *corporate governance* dan integritas dari laporan keuangan perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika dalam penulisan tugas ini dijelaskan sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang masalah mengenai komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Selanjutnya, penelitian ini juga menjelaskan mengenai perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian dan penelitian terdahulu. Selain itu, dalam bab ini menjelaskan tentang komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.

c. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam perusahaan serta definisi operasionalnya, apakah jenis dan sumber data yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa yang dilakukan.

d. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validasi dan reabilitas, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

e. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari analisis yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian.